

**POLITIK EFISIENSI ANGGARAN MANGKUNEGARA VI TAHUN 1911 - 1915****APRILIA ALIFATUR ROSYIDA**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
E-mail: [rizha.aprilia@live.com](mailto:rizha.aprilia@live.com)

**Agus Trilaksana**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

Mangkunegaran merupakan salah satu akibat dari adanya gejala politik kolonial pada abad ke-18. Mangkunegaran sebagai wilayah Kasunanan Surakarta yang memiliki otonomi sendiri menghadapi segala permasalahannya secara mandiri. Permasalahan yang terjadi mengakibatkan adanya pembaharuan untuk memperbaiki segala aspek kehidupan Mangkunegaran. Krisis ekonomi global pada pertengahan abad ke-19 mengakibatkan Mangkunegaran terlibat hutang dan keuangan berada di ambang kehancuran. Sebagai sosok yang bertanggung jawab, Mangkunegara VI memperbaiki keuangan dengan melakukan efisiensi di segala bidang kehidupan Mangkunegaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah tersebut di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1) mengapa Mangkunegara VI melaksanakan politik efisiensi anggaran, 2) bagaimana pelaksanaan politik efisiensi anggaran di dalam Kadipaten Mangkunegaran, serta 3) bagaimana dampak politik efisiensi anggaran Mangkunegara VI bagi kehidupan kerabat dan rakyat.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap. Pertama, tahap pengumpulan sumber yang dilakukan di arsip dan perpustakaan Rekso Pustaka Mangkunegaran. Tahap kedua melakukan kritik sumber untuk menghasilkan data yang valid. Ketiga, dilakukan interpretasi untuk menghasilkan fakta. Tahap terakhir, historiografi, melakukan penulisan kembali hasil dari interpretasi ke dalam bentuk skripsi ini.

Berdasarkan hasil analisis data menyatakan bahwa Mangkunegara VI melakukan pembaharuan politik ekonomi dengan tujuan memperbaiki keuangan Mangkunegaran. Politik efisiensi ini dilaksanakan dengan memotong anggaran belanja Mangkunegaran dan pengurangan jumlah jumlah *narapraja* yang kurang kompeten. Selain itu, dikeluarkan pula kebijakan pemisahan antara anggaran Mangkunegaran dan perusahaan untuk menghindari pemborosan. Akibat politik efisiensi ini Mangkunegaran mendapatkan kembali kekayaannya, namun kerabat enggan menghargai usaha dari Mangkunegara VI karena tidak dapat merasakan kemewahan. Pelaksanaan politik ini awalnya memberikan dampak yang kurang baik untuk rakyat, sebab Mangkunegara VI tidak memperhatikan rakyat, hanya melakukan penghematan. Akhir pemerintahannya, taraf hidup rakyat mulai membaik, kebutuhan serta sarana prasarana umum telah terpenuhi.

**Kata kunci: Mangkunegara VI, Efisiensi Anggaran, dan Kesejahteraan****Abstract**

*Mangkunegaran is one of the effect of a chance from the existence of colonial politics. Mangkunegaran as a part of Kasunanan Surakarta who has own otonomy solve the issues independently. The issues that occurred result some renewal to improve Mangkunegaran's conditions. The global economics crisis that happened in middle of 19<sup>th</sup> century on Mangkunegara V's authority causes the Mangkunegaran had a debt with colonial and made the monetary collapsed. As a figure who has responsible, Mangkunegara VI repair the monetary with retrench and doing efficiency in all of aspect of Mangkunegaran.*

*According to the background of issues, the problems that will be discussed is, 1) What the reasons of Mangkunegara VI doing budget efficiency policy, 2) How is the implementation of budget efficiency Policy in Praja mangkunegeran, and 3) How the political impact of budget efficiency for kinsman and commoners.*

*This research is a historical research that consist on four steps. First, heuristic, collecting source in any form relating with topic from the archives and libraries of Mangkunegaran. Second step is make criticisms to select a valid sources. Third, doing interpretation for relating and analyzing source. The last is historiography for reconstructing the past in this essay.*

*The results shows that Mangkunegara VI did a renewal of politics to improve monetary of Praja Mangkunegaran. The efficiency politics was held with the implementation of budget saving and decreasing the amounts of narapraja who has no competent on their job. Furthermore, the policy also issued the separation between Praja's budgets and industrial budget to avoid improvidence which done by the kinsman of Mangkunegara. As a result of*

*political implementation of this efficiency, Mangkunegaran got back the wealth, but the kinsman didn't want to recognize the efforts of Mangkunegara VI because they can't live with the luxuriness. For the commoners, the implementation initially give them unfavorable impact, because the lord didn't matter with their necessary and focusing only to the budget saving. On the end of Mangkunegara VI authority, the standart of living getting better and the necessities have been fulfilled.*

**Keywords:** *Mangkunegara VI, Efficiency politics, and Prosperity*

## PENDAHULUAN

Ekspansi kekuasaan kolonial pada abad ke-19 merupakan gerakan kolonialisme yang paling besar pengaruhnya dalam membawa dampak perubahan politik, ekonomi, sosial dan budaya di negara-negara yang mengalami penjajahan penetrasi kekuasaan politik dan ekonomi Barat dan mengakibatkan terjadinya proses transformasi struktural dari struktur politik dan ekonomi tradisional ke arah struktur politik dan ekonomi kolonial serta modern.<sup>1</sup> Keberadaan Mangkunegaran merupakan salah satu contoh adanya pengaruh politik kolonial di Nusantara, khususnya di Jawa. Sebagai sebuah wilayah dari Kasunanan yang berdiri sendiri, Mangkunegaran merupakan sebuah bukti bahwa pemikiran barat dapat berkembang di Jawa.

Secara administrasi, Mangkunegaran bukanlah sebuah kerajaan, namun juga bukan sebuah kabupaten. Mangkunegaran bisa dikatakan sebagai sebuah wilayah yang memiliki kekuasaan sendiri, atau bisa dikatakan bahwa Mangkunegaran adalah kerajaan kecil atau kabupaten yang besar.<sup>2</sup> Sebagai wilayah yang memiliki kekuasaan sendiri, Mangkunegaran mandiri dalam menyelesaikan segala macam permasalahan, salah satunya adalah keuangan. Uang merupakan akses dalam kehidupan ekonomi, sehingga keberadaannya harus tetap stabil jika perlu harus selalu meningkat. Mangkunegaran dalam menjaga kehidupan ekonominya telah mengalami berbagai perubahan model kekuasaan, sebab setiap Mangkunegara memiliki caranya masing-masing dalam mengatasi masalah keuangan.

Mangkunegara VI merupakan pemakarsa dalam pembaharuan keuangan Mangkunegaran. Langkah pertama yang dilakukan oleh Mangkunegara VI dalam politik efisiensi anggarannya adalah memotong gaji dan tunjangan para abdi kerajaan, bahkan tunjangan-tunjangan untuk keluarga dan kerabat raja juga dipotong untuk memperbaiki keuangan Praja.<sup>3</sup> Selain memotong tunjangan, pada era Mangkunegara VI diadakan pemisahan antara uang pribadi Praja dan uang Perusahaan. Mangkunegara VI melakukan hal tersebut untuk

menghindari adanya pemborosan dan mengamankan keadaan keuangan Mangkunegaran. Mangkunegara VI dianggap pelit karena memotong tunjangan dan gaji kerabatnya sendiri. Akibat kebijakannya tersebut, uang Praja memang terselamatkan, namun di lain pihak, banyak musuh yang mencoba menghasut dan melucuti kekuasaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah 1) mengapa Mangkunegara VI melaksanakan politik efisiensi anggaran, 2) bagaimana pelaksanaan politik efisiensi anggaran di dalam Kadipaten Mangkunegaran, serta 3) bagaimana dampak politik efisiensi anggaran Mangkunegara VI bagi kehidupan kerabat dan rakyat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 1) Untuk menjelaskan latar belakang Mangkunegara VI melaksanakan politik efisiensi anggaran, 2) Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan politik efisiensi anggaran dalam kehidupan Praja Mangkunegaran, dan 3) Untuk menganalisis bagaimana dampak politik efisiensi anggaran Mangkunegara VI bagi kehidupan kerabat raja dan rakyat. Penelitian ini akan membahas mengenai politik efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Mangkunegaran tahun 1911 - 1915. Penelitian ini difokuskan pada latar belakang pelaksanaan politik efisiensi anggaran, pelaksanaan politik efisiensi anggaran tersebut, serta dampaknya terhadap keuangan dan kehidupan masyarakat Mangkunegaran.

## Kajian Pustaka

Beberapa penulis yang telah membahas mengenai politik efisiensi anggaran adalah sebagai berikut;

Wasino dengan judul "*Modernisasi di Jantung Budaya Jawa : Mangkunegaran 1896 - 1944*" berisi tentang pembaharuan-pembaharuan hukum, politik, serta perekonomian di Mangkunegaran dalam kurun waktu lebih kurang 48 tahun. Wasino dalam buku ini menjelaskan bahwa Mangkunegara VI merupakan sosok yang merubah kehidupan Mangkunegaran. Buku ini secara umum membahas pembaharuan-pembaharuan di segala bidang yang dilakukan oleh Mangkunegara VI yang dteruskan oleh generasi selanjutnya. Buku ini menjelaskan bahwa pada masa Mangkunegara VI dilakukan penghematan besar-besaran untuk mengurangi dampak krisis yang melanda Mangkunegaran pada

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, hlm. 5.

<sup>2</sup> Wasino. 2008. *Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKiS, hlm.18.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 123.

generasi sebelumnya. Selain penghematan, Wasino juga menjelaskan bahwa Mangkunegara VI melakukan pemisahan keuangan pribadi dan perusahaan agar pemborosan dapat dikurangi.

Zaairul Haaq dengan bukunya yang berjudul "*Mangkunegara I Kisah Kepahlawanan dan Filosofi Perjuangan Pangeran Samber Nyawa*". Meskipun membahas filosofi kepahlawanan Mangkunegara I, Zaairul Haaq juga membahas mengenai penghematan yang dilakukan oleh Mangkunegara VI untuk mengembalikan keuangan Praja. Buku ini menjelaskan bahwa Mangkunegara VI memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki keuangan Praja yang telah di ambang kehancuran akibat hutang dan krisis yang melanda Mangkunegaran pada pemerintahan sebelumnya.

Buku karya Suhartono dengan judul "*Bekel Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1880 – 1920*" berisi tentang kehidupan sosial rakyat Surakarta di dalam dualisme kepemimpinan, yaitu Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Dalam buku ini dapat diketahui gambaran perbedaan kehidupan antara para pejabat, kerabat, dan rakyat kecil yang ada di Surakarta, sebab tidak ada bedanya kehidupan sosial di wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran antara tahun 1880 hingga 1920.

Skripsi milik RM. Iwan Krishna Wardana dengan judul "*Perusahaan Gula Praja Mangkunegaran Masa K.G.P.A.A. Mangkunegara VI (1896 - 1916)*" yang diterbitkan oleh Universitas Sebelas Maret. Dalam skripsi ini menjelaskan kondisi perusahaan gula sebagai penunjang ekonomi Praja selama lebih kurang lebih 39 tahun pemerintahan Mangkunegara VI. Selain itu RM. Iwan Krishna juga menjabarkan kebijakan-kebijakan politik yang pernah dikeluarkan Mangkunegara VI dan berpengaruh pada kondisi perusahaan gula dan keuangan Praja. Dalam skripsi ini juga dijelaskan posisi-posisi penting yang selama Mangkunegara VI diperkuat agar mendukung kondisi ekonomi Praja, karena selama pemerintahannya Mangkunegara VI berhasrat untuk memperkaya Praja.

Tesis milik Wasino dengan judul "*Kebijakan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran pada Akhir Abad XIX - Pertengahan Abad XX*". Penelitian ini cukup banyak membahas mengenai kebijakan baru yang dilakukan Mangkunegoro VI dan VII sehingga cukup membantu memberikan informasi dan gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat itu khususnya pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Penelitian tersebut membahas kebijakan-kebijakan yang membuat keuangan Praja menjadi stabil kembali, akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak dijelaskan secara khusus pada pemerintahan

siapa pembaharuan tersebut dilakukan. Dalam tesis Wasino juga masih belum dijelaskan seperti apa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Mangkunegara VI. Kebijakan yang dimaksud dalam tesis ini adalah usaha-usaha yang dilakukan para Mangkunegara untuk menghadapi perubahan yang bsdang terjadi pada masa kolonialisme karena pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sempat terjadi perubahan politik di dalam pemerintahan kolonial. Terjadinya perubahan politik, dari politik kolonial menjadi politik etis, memengaruhi bagaimana cara Mangkunegara memerintah kadipatennya, sehingga dibutuhkan usaha-usaha sebagai pertahanan untuk menghadapi perubahan. Sayangnya, tesis ini masih belum menjabarkan secara gambalang bagaimana kondisi masyarakat setelah usaha-usaha dari irigasi, pendidikan, dan kesehatan tersebut diberlakukan. Penjelasan yang ada hanya merupakan penjelasan mengenai kondisi keuangan di dalam Mangkunegaran yang mengalami kenaikan secara drastis, namun kondisi masyarakat di masaperubahan tersebut, akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, masih belum dijelaskan, sehingga masih menimbulkan tanda tanya seperti apa kondisi masyarakat selama terjadinya perubahan politik.

#### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Terdapat empat tahap yang harus dilakukan, yaitu :

#### **Heuristik**

Tahap ini merupakan langkah awal pada penelitian sejarah. Pada tahap ini dilakukan pencarian sumber yang terdiri dari dua sumber, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer dari penelitian ini terdiri dari *arsip-arsip Mangkunegaran bundel MN, arsip Mangkunegaran bundel D, Surat rahasia residen tahun 1879, laporan keuangan tahun 1900 - 1915, pranatan 4 Maret 1911, pranatan 5 November 1912, pranatan 15 Desember 1915, Keputusan Pemerintah tanggal 15 April 1899, Keputusan Pemerintah tanggal 2 Juni 1911, Serat Babad Ringkesan Ingkang Sami Jumeneng Ing Praja Mangkunegaran.*

Sumber sekunder yang digunakan terdiri dari *Geschiedenis der Ondernemingen ven het Mangkoenagorische Rijk, Geschiedenis der Eigendommen van het Mangkoenagorische Rijk, Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa, Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi, serta buku-buku lain yang membahas mengenai Mangkunegaran, perkebunan, serta perekonomian.* Sumber-sumber tersebut di dapat melalui penelusuran dari arsip dan perpustakaan Reksa Pustaka



Mangkunegaran, arsip dan perpustakaan daerah Surakarta, perpustakaan daerah Jawa Timur, perpustakaan umum kabupaten Tuban, perpustakaan Universitas Sebelas Maret, dan perpustakaan warga Laweyan, Surakarta.

### Kritik Sumber

Kritik sumber terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan kritik yang meliputi tulisan, kata-kata, bahasa, dan analisa mengenai kalimat yang membuktikan bahwa sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Penulis melakukan pengujian kredibilitas sumber yang ditelusuri dengan kritik intern. Dalam kritik intern penulis membandingkan satu sumber dengan sumber yang lain yang telah dikumpulkan. Tahap ini penulis memilah dan membandingkan naskah-naskah sejaman dari para pujangga keraton dengan laporan-laporan serta arsip-arsip sejaman yang telah dibukukan, sebab naskah-naskah sejaman yang dituliskan oleh pujangga keratin belum tentu sesuai dengan laporan yang ditulis sendiri oleh raja. Proses kritik sumber ini menghasilkan data-data yang mengacu pada pemerintahan Mangkunegara VI, tentang sistem-sistem pembaruan yang sedang dijalankan. Kemudian bagaimana keadaan masyarakat dan kerabat ketika beliau menjalankan pembaruannya tersebut.

### Interpretasi

Interpretasi yaitu usaha penafsiran terhadap data yang telah diseleksi dan yang telah dilakukan kritik sumber untuk membangun fakta sejarah. Penelitian ini berusaha menjelaskan dan menjabarkan bagaimana Mangkunegara VI melaksanakan kebijakan keuangan yang baru baik di kalangan kerabat raja maupun masyarakat. Data-data yang dianalisis disesuaikan pula dengan permasalahan-permasalahan yang akan dijelaskan. Fakta yang telah dihasilkan kemudian di sintesis, atau digabungkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas agar fakta-fakta tersebut tersusun sesuai kronologi dan permasalahannya.

### Historiografi

Historiografi, yakni penyampaian hasil penelitian dalam bentuk kisah sejarah atau penulisan sejarah. Setelah melakukan ketiga tahap penelitian sejarah, tahap terakhir dalam penelitian adalah menjabarkan dan menceritakan hasil penelitian dalam bentuk cerita atau kisah sejarah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Historiografi disampaikan dan disajikan dalam bentuk tulisan yang ilmiah. Skripsi ini merupakan bentuk dari historiografi Politik Efisiensi Anggaran Mangkunegara VI Tahun 1911 - 1915.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu (1) latar belakang Mangkunegara VI melaksanakan politik efisiensi anggaran, (2) pelaksanaan politik efisiensi anggaran dalam kehidupan Praja Mangkunegaran, dan (3) dampak politik efisiensi anggaran Mangkunegara VI bagi kehidupan kerabat raja dan rakyat. Adapun pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut;

#### A. Latar Belakang Pelaksanaan Politik Efisiensi Anggaran Mangkunegara VI

Pelaksanaan politik efisiensi anggaran Mangkunegara VI pada hakekatnya dilatarbelakangi oleh pelbagai hal yang sangat perlu dipertimbangkan untuk diadakan pembaharuan. hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kehidupan keuangan dan perekonomian Mangkunegaran. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi politik efisiensi anggaran adalah sebagai berikut;

##### 1. Kegemilangan Pemerintahan Mangkunegara IV

Masa pemerintahan Mangkunegara IV merupakan masa yang gemilang sepanjang sejarah Mangkunegaran. Awal pemerintahannya Mangkunegara IV sudah mengambil suatu kebijakan yang sangat luar biasa, yaitu ingin mengambil kembali tanah-tanah *lungguh*<sup>4</sup> yang disewa oleh bangsa Eropa dan juga sebagai gaji para pangeran dan juga abdi dalem.<sup>5</sup> Tujuan dari pencabutan tanah *lungguh* tersebut adalah untuk membangun basis ekonomi modern atau kapitalis yang sedang berkembang di dunia barat. Basis ekonomi modern yang dibangun oleh Mangkunegara IV adalah perkebunan dan industri gula. Lahan yang semula disewakan kepada para pengusaha Barat oleh para pemegang *lungguh* untuk industri perkebunan diambil alih dan dikembangkan sendiri sebagai pusat ekonomi Praja. Industri perkebunan tersebut meliputi perkebunan tebu dan kopi, yang mana pada sekitar abad ke-18 dan ke-19 kedua tanaman tersebut mempunyai harga yang tinggi di pasaran Eropa. Hal tersebut yang

<sup>4</sup>Tanah *lungguh* atau *apanage* merupakan tanah gaji bagi para bangsawan dan pejabat Praja (aristokrat). Status tanah *lungguh* bukan hak milik, melainkan hak meminjam, oleh karenanya dalam waktu tertentu tanah itu dapat diambil kembali oleh raja. tanah *lungguh* yang diberikan kepada para bangsawan dapat diwariskan kepada anak laki-laki sampai keturunan keempat. Wasino. 2008. *Ibid.*, hlm. 26 - 27.

<sup>5</sup> Abdul Karim Pringgodigdo. 1950. *Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenagarosche Rijk*. Surakarta: Reksa Pustaka, hlm. 31.

mendorong Mangkunegara IV untuk mengembangkang pekebunan kopi dan tebu.

Pembaharuan Mangkunegara IV di bidang perekonomian memang menguntungkan bagi Praja Mangkunegaran, namun mengandung resiko yang cukup fatal bagi kelangsungan perekonomian Praja itu sendiri. Pembaharuan yang paling menonjol dan luar biasa adalah masuknya perekonomian Mangkunegaran di pasaran dunia lewat hasil usaha industri perkebunannya. Masuknya perekonomian Mangkunegaran pada pasaran dunia memang dapat menguntungkan, sebab hasil perkebunan Mangkunegaran merupakan barang yang dibutuhkan dunia dengan harga yang cukup tinggi, namun apabila keadaan pasar dunia sedang memburuk, secara tidak langsung dampaknya juga berpengaruh terhadap keuangan Mangkunegaran.

Akibat dicabutnya *apanage* atau *lungguh* di Mangkunegaran mengakibatkan timbulnya kecemburuan antar pihak pejabat dan kerabat. Seperti yang telah disebutkan bahwa uang ganti *lungguh* yang diberikan berdasarkan kualitas tanah, sehingga meskipun luas *lungguh* setiap pejabat itu sama gaji yang mereka dapat tentunya berbeda. Hal tersebut membuat saling iri hati antar para pejabat yang tidak dapat dihindari. Kebiasaan memegang uang dari upeti *lungguh* tiap hari tidak lagi dapat dirasakan sehingga mereka melakukan segala cara untuk tetap hidup mewah setiap hari. Salah satu cara yang dilakukan adalah berhutang pada pengusaha-pengusaha swasta Eropa karena dianggap paling mudah, sehingga para pejabat Mangkunegaran sebagian besar memiliki hutang kepada orang Eropa.<sup>6</sup> Meskipun demikian, kondisi keuangan para kerabat dan pejabat secara umum masih terbilang sangat cukup, karena tiap bulann mereka mendapatkan gaji tetap. Hanya saja mereka tidak dapat memperhitungkan secara maksimal uang yang mereka dapat sehingga mereka tetap menganggap bahwa mereka masih kekuarangan.

Kondisi rakyat pada masa Mangkunegara IV berangsur membaik. Kondisi tersebut dapat dijumpai di desa-desa Mangkunegaran, di Baturetno misalnya, Mangkunegara IV menunjukkan bahwa dengan dihapuskannya sistem *lungguh*, kehidupan sosial rakyatnya juga

membaik, dan perekonomiannya mengalami kemajuan. Dulunya rakyat kecil tak berani beradu sapa dengan kepala desanya, namun setelah tidak ada *lungguh*, garis antara pejabat dan rakyat biasa seakan tidak Nampak lagi. Rakyat telah berani berbicara mengutarakan idenya kepada kepala desa atau bahkan patih yang sedang bertugas mengawasi di perkebunan.<sup>7</sup> Oleh karena itu dapat diketahui bahwa secara garis besar industri yang dijalankan Mangkunegara IV memebuhkan hasil yang positif, sehingga berbanding lurus dengan kehidupan rakyat Mangkunegaran selama masa pemerintahannya berlangsung.

## 2. Krisis Ekonomi pada Masa Mangkunegara V

Setelah Mangkunegara IV wafat pada 2 September 1881, puteranya menggantikan jabatan menjadi pemimpin Mangkunegaran dengan gelar Mangkunegara V. Namanya adalah Prangwedana dan masih berumur 28 tahun, merupakan putera kedua Mangkunegara IV dari permaisuri yang merupakan perkawinan kedua. Pemerintahan Mangkunegara V berakhir pada 1 Oktober 1896 karena kecelakaan yang dialaminya.<sup>8</sup> Awal pemerintahan Mangkunegara V tahun 1881 pemerintah Belanda membuat peraturan bahwa bangsa Belanda diperbolehkan menyewa tanah di daerah-daerah pesisir utara pulau Jawa dan tanah-tanah di daerah Kraton Surakarta maupun Yogyakarta. Akibat dikeluarkannya peraturan tersebut maka bangsa Belanda banyak membuka perkebunan-perkebunan seperti perkebunan kopi, tebu, dan niladan meraup keuntungan yang cukup banyak dari hasil perkebunan tersebut.

Selanjutnya, untuk memudahkan transportasi, pada tanggal 14 Maret 1882 pemerintah kolonial membuka jalan kereta api jurusan Paron - Sragen - Surakarta, sehingga hubungan antara Surakarta dengan Surabaya dan Kediri menjadi lancar.<sup>9</sup> Meskipun pembuatan jalur kereta api tersebut dapat lebih meningkatkan dan mempermudah peningkatan ekonomi, namun Mangkunegaran di bawah pemerintahan Mangkunegara V sudah menunjukkan suatu kemunduran menuju ke arah

<sup>7</sup> Surat Rahasia dari Residen Surakarta kepada Pemerintah Hindia Belanda tanggal 12 April 1879. Arsip Reksa Pustaka

<sup>8</sup> Mansfeld. Mansfeld, W.F. TT. 1986. *Geschiedenis der Eigendommen van het Mangkoenagorosche Rijk*. Surakarta: Reksa Pustaka, hlm. 54.

<sup>9</sup> Suhomatmoko. tanpa tahun. *Babad Ringkasan Padatan Kanjeng Gusti Adipati Aria Mangkunegara I – VI*. Surakarta: Rekso Pustaka, hlm. 114.

<sup>6</sup> Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1880 - 1920*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, hlm. 68.

kehancuran. Hal itu karena usaha-usaha yang diwariskan oleh Mangkunegara IV diteruskan oleh seorang raja yang baik hati tetapi lemah.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mangkunegara V selalu dipengaruhi oleh pihak keluarga termasuk dalam hal keuangan. Mangkunegara V tidak begitu memikirkan mengenai urusan istananya karena semua yang berhubungan dengan urusan istananya diserahkan kepada kepala urusan istana yang dijabat oleh Pangeran Gondoatmojo, dan dibantu oleh para *narapraja*<sup>10</sup> pegawainya.<sup>11</sup> Kurangnya pengawasan dari Mangkunegara V menyebabkan Gondoatmojo dan pegawainya mengelola keuangan semauanya sendiri tanpa tanggung jawab. Akibatnya, urusan-urusan keuangan dan perusahaan dikelola oleh orang-orang yang tidak cakap serta pengawasan terhadap keuangan hanya dilakukan secara pura-pura sehingga banyak pejabat istana yang melakukan korupsi.

Terjadinya krisis dunia pada tahun 1880-an sangat berpengaruh terhadap perekonomian Mangkunegaran, terutama pada hasil perkebunannya. Hal itu dikarenakan pada masa Mangkunegara IV penjualan hasil perkebunan tebu dan kopi dijual ke pasar dunia sehingga harga ditentukan oleh pasar dunia, dengan demikian fluktuasi harga kopi dan gula tergantung oleh permintaan dari pasar. Akibat dari krisis dunia tersebut adalah terjadinya proteksi terhadap jumlah produksi gula di Eropa yang menyebabkan peredaran gula dalam negeri menjadi lebih besar karena tidak dapat diserap dalam pasaran Eropa yang selama ini menjadi pasar utama produksi gula dari Jawa.<sup>12</sup>

Semua usaha-usaha Prangwedana sebagai Mangkunegara V untuk menambah pendapatan Praja Mangkunegaran tidak berjalan dengan sukses bahkan cenderung mengalami kegagalan. Ironisnya kegagalan-kegagalan usaha untuk menambah keuangan Praja Mangkunegaran tersebut tidak membuat Mangkunegara V mengurangi biaya pengeluaran setiap bulannya. Mangkunegara V akhirnya meminta bantuan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membantu keuangan Praja. Pemerintahan bersedia membantu Mangkunegara V, namun dengan syarat Mangkunegara V menyetujui

pembentukan sebuah komisi dengan nama *Raad van Toezicht Belastmet de Regeling van de Mangkoenegorosche Landen en Bezettingen* (Dewan Pengawas yang mengatur urusan keuangan, tanah, dan barang-barang milik Mangkunegaran).<sup>13</sup> Komisi tersebut mencampuri segala urusan keuangan dan pengelolaan usaha-usaha milik Mangkunegaran.

Krisis ekonomi global pada tahun 1880-an berpengaruh pada kehidupan ekonomi dan sosial rakyat Mnagkunegaran. Sayangnya, golongan sentana dan *narapraja* yang bekerja dan hidup di dalam istana tidak begitu merasakan dampak dari krisis ekonomi. Hal itu karena mereka masih mendapatkan kehidupan dan mencukupi, sebab kebutuhannya masih dapat dipenuhi oleh istana, terutama para anggota keluarga raja, mereka masih dapat hidup berfoya-foya layaknya bangsawan. Dampak dari krisis keuangan Praja lambat laun mulai dirasakan para pegawai yang bekerja di Praja Mangkunegaran, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa para pegawai sudah tidak mendapat gaji lagi selama sembilan bulan, sehingga para pegawai sudah tidak memegang uang gaji mereka, dan harus mencari alternative lain. Cara berpolitikanya yang kurang cakap membuatnya disokong oleh keluarga yang kurang bertanggung jawab, dan kekuasaannya sebagai seorang Mangkunegara V dipertanyakan oleh para pejabat pemerintahan Belanda.<sup>14</sup>

Masyarakat yang paling merasakan dampak dari krisis ekonomi Mangkunegaran adalah golongan bawah di luar istana. Mereka kebanyakan bermata pencaharian sebagai seorang petani. Dalam konteks lokal di Praja Mangkunegaran, kehidupan sosial ekonomi penduduk terutama golongan petani tidak berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di *Vorstenlanden*. Pada tahun 1888 di Surakarta pendapatan petani kelas I f 64,-, petani kelas II f 48, petani kelas III f 24, dan masing-masing terkena beban pajak tanah sebesar f 12 (8,75%), f 10 (20,80%), f 8 (33,50%).<sup>15</sup>

Pengambilan keputusan untuk menjalankan efisiensi oleh Mangkunegara VI dilatarbelakangi oleh adanya rasa ingin mengembalikan kegemilangan yang pernah

<sup>10</sup> Pegawai atau pembesar kerajaan, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>11</sup> Mansfeld. *Op. cit.*, hlm. 57.

<sup>12</sup> A.K. Pringgodigdo. 1988. *Op.cit.*, hlm. 1.

<sup>13</sup> Mansfeld. *Op.cit.*, hlm. 81.

<sup>14</sup> Aminudin Aris S. 2012. "*Krisis Ekonomi pada Masa Mangkunegara V (1881 - 1896)*". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 121.

<sup>15</sup> Suhartono. *Op.cit.*, hlm. 26.



diraih Mangkunegaran selama masa pemerintahan ayahnya, Mangkunegara IV. Keinginan tersebut didorong dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi di Mangkunegaran sehingga Mangkunegara VI benar-benar memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki ekonomi Praja. Perbaikan tersebut ditempuh dengan adanya pembaharuan dibidang politik ekonomi yang pada akhirnya dikeluarkanlah kebijakan efisiensi anggaran.

## B. Pelaksanaan Politik Efisiensi Anggaran Mangkunegara VI

Adanya krisis yang terjadi di Mangkunegaran membuat Mangkunegara VI merasa bertanggung jawab memperbaiki semua aspek kehidupan termasuk ekonomi dan finansial. Perbaikan tersebut merupakan sebuah pembaharuan yang terjadi di dalam Mangkunegaran. Mangkunegara VI mengeluarkan kebijakan penghematan dengan tujuan meminimalisir semua pengeluaran agar pemborosan yang ditakutkan tidak terjadi. Perbaikan atau pembaharuan tersebut tidak serta merta dilakukan, tahap demi tahap dilakukan untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan politik efisiensi anggaran adalah sebagai berikut;

### 1. Usaha Awal Pelaksanaan Politik Efisiensi Anggaran

Usaha awal untuk menghemat pengeluaran adalah memotong tunjangan untuknya dan keluarganya, R.M. Sujitno sebagai mangkunegara VI mulai memotong tunjangannya tersebut pada akhir tahun 1899. Tujuannya adalah untuk membantu mengontrol pemasukan dan pengeluaran yang ada di dalam Mangkunegaran, sehingga usaha dalam industri perkebunan dapat berjalan dengan maksimal. Apabila usaha perkebunan dan pabrik dapat berjalan lancar, maka keuntungan yang didapat juga akan dirasakan oleh raja, kerabat raja, dan pejabat yang ada di istana.

Perbaikan urusan keuangan selanjutnya dilakukan di dalam industri perkebunan. Tahun 1901, peraturan mengenai kewajiban menyerahkan kopi kepada Gubernur dihapuskan, sehingga terjadi perubahan dalam budidaya tanaman ini. Pada tahun ini pula pabrik nila ditutup, sebab menurut Mangkunegara, laba bersih yang dihasilkan oleh pabrik nila kurang dibanding dengan laba yang dihasilkan oleh pabrik gula. Selanjutnya, pada tahun 1902, dipasang jalan kereta api kecil dari pabrik gula

ke stasiun Balapan, khusus untuk transport gula, dan Pabrik gula Tasik Madu lah yang membiayai keperluan pembelian material untuk jalan kereta api trayek Malangjiwan - Balapan tersebut. Tahun 1904, pabrik gula Colo Madu membeli perkebunan Klodran untuk keperluan budidaya tebu. Perkebunan tersebut dibeli dengan harga f 20.000,- dan f 5.460,- untuk biaya pembelian bibit tebu. Tahun-tahun selanjutnya tidak ada instruksi baru dari Mangkunegara, semua perkebunan dan pabrik-pabrik memproduksi seperti biasanya.<sup>16</sup>

Mangkunegara VI kembali memberikan instruksi pada tahun 1910, beliau memutuskan untuk menutup pabrik bungkil yang ada di Polokarto dan Mojoretno. Pabrik bungkil tersebut diganti dengan perusahaan beras yang mulai beroperasi pada tahun 1911. Usaha-usaha yang dijalankan Mangkunegara VI ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan dan hubungan antar rakyatnya, sebab Mangkunegara VI merasa memiliki tanggung jawab untuk merubah kehidupan Mangkunegaran yang sebelumnya dibalut dengan kesukaran-kesukaran. Usaha awal yang dilaksanakan oleh Mangkunegara VI membuahkan hasil yang sangat memuaskan, selain hutang-hutang yang telah lunas, keuangan Mangkunegaran mengalami surplus. Dalam tahun 1910 saja kekayaan Mangkunegaran sebesar f 6.004.800,-.

### 2. Kebijakan Politik Efisiensi Anggaran Mangkunegara VI Tahun 1911 – 1915

Politik efisiensi anggaran merupakan sebuah kebijakan di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Mangkunegaran yang sedang mengalami kesulitan. Penggagas dari kebijakan ini adalah R.M Sujitno yang pada oktober 1896 diangkat menjadi pemimpin *trah* sekaligus pemerintahan Mangkunegaran dengan gelar Mangkunegara VI.<sup>17</sup> Naiknya R. M. Sujitno menjadi Mangkunegara VI bersamaan dengan perubahan politik dari kolonial menjadi politik etis.<sup>18</sup> Pada masa inilah berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki segala aspek di Mangkunegaran termasuk urusan keuangan. Adapun kebijakan yang dikeluarkan adalah sebagai berikut;

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 153 - 154.

<sup>17</sup>Mansfeld, *Op.Cit.*, hlm. 138.

<sup>18</sup>Wasino. 2014. *Mordenisasi di Jantung Budaya Jawa : Mangkunegaran 1896 - 1944*. Jakarta: Penerbit Kompas, hlm. 57.

**a. Kebijakan Pemisahan Uang Pribadi Praja dan Uang Perusahaan**

Langkah awal yang dijalankan Mangkunegara VI dalam politik efisiensinya adalah mengeluarkan kebijakan pemisahan keuangan. Keuangan dipisah antara Praja dan Perusahaan. Kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan pada pranatan tanggal 4 Maret 1911 yang menyebutkan bahwa uang yang diperoleh dari laba perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, dan harta milik lain yang akan diurus tersendiri dari sewa tanah, dan semua penerimaan sejenis itu, termasuk bunga dari modal yang didepositkan, dikelola langsung serta akan digunakan hanya untuk kepentingan Praja.<sup>19</sup> Urusan keuangan di perusahaan dan pabrik-pabrik diurus dan diawasi oleh *superintendent*<sup>20</sup> di bantu oleh Patih yang telah ditunjuk Mangkunegaran. Urusan keuangan Praja itu sendiri dikelola dan diawasi oleh R. M. Sujitno sebagai Mangkunegara VI yang diawasi oleh Residen.

Kebijakan pemisahan uang Praja dan perusahaan ini mulai dijalankan pada awal tahun 1912. Urusan keuangan di perusahaan dan pabrik-pabrik diurus dan diawasi oleh *superintendent* di bantu oleh Patih yang telah ditunjuk Mangkunegaran. Urusan keuangan Praja itu sendiri dikelola dan diawasi oleh Sujitno sebagai Mangkunegara VI yang diawasi oleh Residen.

**b. Kebijakan Superintendent sebagai Pengawas di perusahaan Mangkunegaran**

Pada masa Mangkunegara VI ini keberadaan *superintendent* sangat dibutuhkan, sebab usaha yang dilakukan Mangkunegara di industri perkebunannya semakin menunjukkan kemajuan. Pelaksanaan program pemisahan anggaran membuat Mangkunegara VI mengalami sedikit kesulitan dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan bantuan dari orang yang telah berpengalaman dalam bidangnya. Keberadaan *superintendent* bagi

mangkunegara VI sangatlah berguna, meskipun seorang Belanda, *superintendent* bukanlah sebuah jabatan yang diidamkan oleh tiap orang Belanda, bahkan dianggap sebagai rendahan, sebab seorang *superintendent* harus tunduk dengan kekuasaan Mangkunegara.<sup>21</sup>

Seorang *superintendent* yang hendak diangkat oleh Mangkunegara harus mendapatkan persetujuan dulu dari Residen Surakarta. Selain itu, jumlah gaji yang layak diterima oleh *superintendent* harus didiskusikan terlebih dahulu dengan Residen Surakarta. Gaji seorang *superintendent* ditentukan sebesar f 850,- per bulan, yang separo dibayar dari keuntungan perusahaan dan setengahnya dari kas Praja. Selain gaji, seorang *superintendent* juga mendapatkan keuntungan lain, misalnya, hadiah apabila perusahaan mendapatkan untung yang lebih, serta tunjangan yang berupa tunjangan perjalanan, penginapan, dan pakaian. Dengan gaji dan tunjangan yang sangat menguntungkan tersebut, seorang *superintendent* memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola seluruh urusan keuangan perusahaan Mangkunegaran.<sup>22</sup>

**c. Kebijakan Penghematan**

Kebijakan ini memang tidak dipublikasikan oleh Mangkunegara VI, akan tetapi dihimbau untuk semua pihak agar berkenan melakukan penghematan dalam bidang apapun. Penghematan ini dilakukan pula dengan cara memangkas segala hal yang menyebabkan pemborosan. Pemangkasan atau efisiensi salah satunya dengan mengurangi jumlah pegawai yang ada di Mangkunegaran. Pegawai-pegawai yang kurang cakap dikurangi dan diganti dengan yang lebih tepat. Selain memangkas jumlah kepegawaian di Mangkunegaran, Mangkunegara VI juga memangkas kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan pembengkakan pada anggaran pribadi Mangkunegaran, meskipun kegiatan tersebut telah berjalan sejak sebelum Mangkunegara VI menjabat. .

<sup>19</sup> Pranatan tanggal 4 Maret 1911 No. I/Q. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN. No. 454/13.

<sup>20</sup> *Superintendent* di sini berarti seorang pengawas perkebunan atau perusahaan Mangkunegaran yang memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan produksi dan keuangan perusahaan milik Mangkunegaran. Dalam Kamus Besar Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris *superintendent*; *superintendence* berarti pengawas

<sup>21</sup> Mansfeld. *Op.cit.*, hlm. 158.

<sup>22</sup> Surat kesepakatan antara Residen Van Wijk dengan Mangkunegara VI dalam Penganhkatan *Superintendent* tetanggal 15 Juni 1911, dalam Arsip *Binnenlandsch Bestuur* B 76. Surakarta : Reksa Pustaka



#### d. Kebijakan Menguatkan Kas Praja dan Dana Cadangan

Kas Praja telah didirikan pada masa Mangkunegara IV, dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan keuntungan yang di dapatkan Mangkunegaran dari sektor industri. Pada masa Mangkunegara VI, fungsinya berganti menjadi tempat penyimpanan dana cadangan Mangkunegaran, yang merupakan tabungan masa depan Mangkunegaran. Dana cadangan diperoleh dari saldo anggaran belanja pribadi Mangkunegaran dan saldo anggaran perusahaan. Kedua saldo atau sisa anggaran tersebut dijadikan satu dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, beserta kebutuhan-kebutuhan lain seperti inventaris desa, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan.<sup>23</sup>

Dana cadangan ini berfungsi untuk menutup semua kekurangan atau defisit di dalam anggaran belanja Mangkunegaran dan perusahaan. Dengan berjalannya kebijakan penghematan, jumlah dana cadangan Mangkunegaran semakin meningkat, defisit pada anggaran sudah mulai jarang terjadi karena pengeluaran yang dibatasi. Jumlah dana cadangan Mangkunegaran pada akhir pemerintahan Mangkunegara VI bahkan mencapai tujuh juta gulden lebih, jumlah yang cukup besar untuk ukuran kadipaten.

### 3. Pelaksanaan Politik Efisiensi Anggaran Mangkunegara VI Tahun 1911 - 1915

Politik efisiensi anggaran ini merupakan cara Mangkunegara VI untuk memperkuat kekayaan Praja dan mengembalikan masa kejayaannya yang pernah dialami pada masa Mangkunegara IV. Adapun pelaksanaan dari politik efisiensi adalah sebagai berikut:

#### a. Pemisahan Keuangan Praja dan Perusahaan

Pemisahan keuangan mempermudah perhitungan antara kebutuhan Praja dan perusahaan. Adanya pemisahan ini kondisi keuangan di masing-masing kepengurusan juga menjadi lebih baik, sehingga tujuan untuk memajukan produksi di dalam perusahaan bisa berjalan lebih baik.

Pemisahan keuangan ini tidak dapat lepas dari usaha efisiensi anggaran Mangkunegara VI. Penghematan saja tidak cukup apabila tidak ada usaha lain untuk memperbaiki keuangan dan biaya produksi menjadi lebih baik.

Pemisahan keuangan ini terdiri dari pengelolaan keuangan Praja dan perusahaan yang dihitung secara terpisah. Keuangan pribadi terdiri dari urusan keuangan yang meliputi seluruh kebutuhan Praja dan isinya, termasuk kebutuhan raja, keluarga, kerabat, hingga abdi dalem istana. Urusan keuangan Praja ini dikelola oleh Mangkunegara sendiri yang dibantu oleh pejabat-pejabat di pemerintahannya. Semua hasil sewa tanah dan pajaknya, bunga dari pinjaman, uang hasil dari penyewaan asset perumahan di Semarang, serta potongan tunjangan digolongkan sebagai uang masuk untuk Praja. Pengeluarannya memuat seluruh kebutuhan untuk renovasi istana, pengadaan sarana prasarana, gaji abdi dalem, tunjangan keluarga dan kerabat, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak.<sup>24</sup>

Perusahaan milik Mangkunegaran terdiri perkebunan, Pertanian, dan pabrik-pabrik. Uang masuk diperoleh dari keuntungan bersih dari penjualan produk-produk perusahaan. Keuntungan dalam perusahaan terdiri dari dua keuntungan, yakni, keuntungan kotor dan keuntungan bersih. Keuntungan yang didapat oleh perusahaan Mangkunegaran selain digunakan untuk keperluan usaha, juga disisihkan untuk mengisi dana cadangan. Apabila dalam urusan produksi terdapat sisa uang, maka uang tersebut dimasukkan ke dalam dana cadangan. Sayangnya, perusahaan tidak dapat merasakan dana cadangan yang digagas oleh Mangkunegara VI, hal ini dikarenakan laba yang dihasilkan oleh perusahaan lebih dari cukup untuk melakukan kegiatan produksi, sehingga perusahaan tidak akan mengalami defisit.

#### b. Pelaksanaan Penghematan dan Efisiensi

Penghematan dan efisiensi ini dilaksanakan setelah pemisahan keuangan Praja dan perusahaan. Pelaksananya merupakan tindak lanjut dari diadakannya pemisahan keuangan, sebab dari situ, dapat

<sup>23</sup> Mansfeld. *Op.Cit.*, hlm. 177.

<sup>24</sup>A.K. Pringgodigdo. 1950. *Op.cit.*,hlm. 125.

diketahui jumlah pemasukan dan pengeluaran Praja. Penghematan ini dilakukan dengan mengurangi personil-personil legiun dan pegawai-pegawai Mangkunegaran saja. Mereka masih mendapatkan gaji yang sama seperti sebelumnya, hanya jumlahnya saja yang dikurangi.

Pemangkasan atau efisiensi salah satunya dengan mengurangi jumlah pegawai yang ada di Mangkunegaran. Pegawai-pegawai yang kurang cakap dikurangi dan diganti dengan yang lebih tepat. Kantor-kantor yang terlalu banyak pegawainya dikurangi dan dipindahkan ke kantor yang pegawainya kurang.<sup>25</sup> Selain pegawai kantor, Mangkunegara VI juga memangkas jumlah anggota di Legiun Mangkunegaran. Artileri Legiun dihapus, kavaleri dikurangi jumlah prajuritnya dari 80 orang menjadi 40 orang, dua perwira, dan satu kapten. Prajurit infanteri yang semula berjumlah enam kompi dengan masing-masing anggotanya mencapai 100 orang dikurangi menjadi empat kompi dengan total prajurit sebanyak 174 di masing-masing kompi. Penjaga Gardu dan Sura Menggala yang berjumlah 100 orang dihapus di ganti dengan diperluaskannya polisi Reksa Praja.<sup>26</sup>

Selain memangkas jumlah kepegawaian di Mangkunegaran, Mangkunegara VI juga memangkas kegiatan-kegiatan tertentu yang sebelumnya berjalan dengan baik. Pesta pernikahan kerabat diselenggarakan bersama dengan pesta khitanan, bahkan jika perlu dilakukan secara massal. Pertunjukan-pertunjukan seni dikurangi. Klenengan yang menjadi kebiasaan di Mangkunegaran hanya dilaksanakan setiap hari Jum'at. Pentas seni, pesta inagurasi, hanya dilakukan seperlunya saja, jika perlu dihapuskan saja, wayang kulit hanya boleh dipentaskan pada peristiwa-peristiwa besar saja.<sup>27</sup>

### C. Dampak Politik Efisiensi Anggaran Mangkunegara VI

Keberadaan politikefisiensi tentu memiliki dampak tersendiri di dalam aspek kehidupan

Mangkunegaran. Dampak tersebut bisa kearah positif dan negatif. Selama hampir Sembilan belas tahun R. M. Sujitno menjabat sebagai Mangkunegara VI. Jasanya yang besar terhadap pulihnya kondisi keuangan Praja dan perusahaan tidak dapat diragukan. Pelaksanaan politik tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan masyarakat Mangkunegaran, berikut pengaruhnya;

#### 1. Dampak Politik Efisiensi Anggaran terhadap Kondisi Keuangan Mangkunegaran

Setelah diadakannya pembaharuan dalam bidang perekonomian, khususnya keuangan, semakin tahun dana cadangan yang ada di dalam kas Praja juga semakin meningkat. Selama hampir 19 tahun menjabat, dana cadangan yang semula hanya f 300.000,- meningkat tajam menjadi f 7.725.648,75. Alasan mengapa Mangkunegaran tidak pernah mengalami keadaan defisit meskipun pengeluaran Praja lebih besar dari pemasukan adalah adanya dana cadangan tersebut. tidak seimbangnyanya neraca anggaran di dalam perhitungan uang Praja ditutup dengan dana cadangan yang ada di dalam kas Praja. Dana cadangan bergantung pada sisa anggaran yang ada di Mangkunegaran sendiri dan sisa produksi perusahaannya. Dana cadangan ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan uang Mangkunegaran.

Tabel 1  
Dana Cadangan Mangkunegaran 1911 - 1915  
( Dalam Gulden )<sup>28</sup>

Tahun	Dana Cadangan
1911	6.617.655,22
1912	6.389.995,12
1913	6.916.858,04
1914	6.746.271,38
1915	7.725.648,75

( Sumber: Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN. 970 )

Pada tahun 1912 dana cadangan mengalami penurunan karena diambil untuk keperluan pembebasan lahan untuk bidang kehutanan sebesar f 213.837,95, dan penanaman pohon sebesar f 3.000,-.<sup>29</sup> Pada tahun 1914, untuk pertama kalinya dana cadangan digunakan untuk membantu produksi dari perusahaan Mangkunegaran. Tahun 1914, perkebunan kopi mengalami kerugian sebesar f 24.303,79, serta

<sup>25</sup> R. M. S. Hadi Soebroto. Tanpa Tahun. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunagoro VI. Naskah Arsip Reksa Pustaka

<sup>26</sup> Wasino. 2014. *Op.cit.*, hlm. 127.

<sup>27</sup> R.M.S. Hadi Soebroto. *Op.cit.* Arsip Reksa Pustaka.

<sup>28</sup> Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN. No 970/10.

<sup>29</sup> *Ibid.*

kehutanan tidak menghasilkan apa-apa melainkan dilanda kerugian sebesar f 8.000,- akibat pencurian.<sup>30</sup> Keberadaan pabrik gula sangat membantu optimalisasi dana cadangan Mangkunegaran pada tahun 1915. Pabrik gula menyumbang laba bersih sebesar f 1.545.800,- yang mengakibatkan perusahaan dapat menyumbang uang sebesar f 979.377,37 untuk dana cadangan.<sup>31</sup>

## 2. Dampak Politik Efisiensi Anggaran terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Kerabat Mangkunegara VI

Sembilan belas tahun masa pemerintahan Mangkunegara VI, sebagian besar kerabat kurang senang dengan dengan caranya menjalankan pemerintahan. Meskipun sempat menaikkan tunjangan kerabat, hal tersebut tidak bisa dianggap memuaskan bagi kerabat. Selama 19 tahun tersebut, keuangan Praja semakin lama semakin membaik bahkan mengalami peningkatan tajam, namun Mangkunegara VI tetap membatasi pengeluaran-pengeluaran untuk kebutuhan kerabat. Para kerabat menganggap bahwa Mangkunegara VI merupakan seorang pemimpin yang pelit, tidak mengizinkan kerabatnya untuk merasakan hidup selayaknya bangsawan, hanya sibuk memperkaya kas Praja dan lupa akan kehidupan orang-orang disekitarnya.<sup>32</sup>

Sikap Mangkunegara VI yang demikian menyebabkan kerabat tidak menyukainya, terlebih orang-orang yang sejak awal telah menentang kepemimpinannya. Atas usul Residen, alangkah baiknya bila Mangkunegara VI mengabdikan keinginan dari para kerabat, sebab dana cadangan yang ada di dalam kas Praja jumlahnya sangat banyak, sehingga cukup untuk mencukupi kebutuhan kerabat. Usul tersebut ditanggapi dengan lapang dada olehnya, namun Mangkunegara VI tetap melakukan penghematan agar pengeluaran Praja tidak sampai membengkak, sebab akan berdampak buruk bila membiarkan kerabat mendapatkan keinginannya, sebab pengeluaran dari kerabat selalu tidak terduga jumlahnya.

Pelaksanaan politik ini dampaknya bermacam-macam. Adanya efisiensi dan penghematan membuat kerabat merasa bukan seperti bangsawan, sehingga menimbulkan rasa

tidak suka terhadap Mangkunegara VI yang sedang menjabat. Kerabat merasa mereka hidup seperti rakyat biasa, hidup seadanya, padahal kas Praja jumlahnya melimpah, seakan kehidupan kerabat dipermainkan oleh Mangkunegara VI. Dalam strata sosial, mereka masih merupakan bangsawan keraton, dan dalam kehidupan ekonomi mereka hidup sederhana seperti para pedagang, namun hidup di dalam istana.

## 3. Dampak Politik Efisiensi Anggaran terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Rakyat Mangkunegaran

Pada awal pelaksanaan politik efisiensi kondisi perekonomian penduduk desa sebagai rakyat Mangkunegaran masih dalam kondisi kurang baik. Para penduduk desa sebagian besar merupakan pekerja atau buruh di perusahaan Mangkunegaran. Upah yang mereka dapatkan sewaktu bekerja memang dapat menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari, namun, kondisi infrastruktur dan keamanannya masih belum ditingkatkan. Hal tersebut menyebabkan maraknya kejadian pencurian, terlebih di rumah-rumah kepala desa dan perangkatnya.<sup>33</sup> Kondisi yang demikian ditunjukkan Residen kepada Mangkunegara VI, akibat terlalu sibuk memperkaya keuangan Mangkunegaran.

Kesuksesannya menggemukkan kas Praja membuatnya lupa dengan kepentingan umum rakyat sebagai tujuan diadakannya efisiensi. Kondisi masyarakat yang ada di awal pemerintahannya ternyata tidak mengalami perubahan. Mangkunegara VI berpikir upah yang telah diberikannya kepada pekerja akan mampu mensejahterakan rakyatnya. Sewa tanah sudah tidak diawasi sehingga perhitungannya tidak atas dasar yang baik dan mengakibatkan buruknya taraf hidup rakyat Mangkunegaran.<sup>34</sup> Pendidikan yang minim membuat rakyat gampang dibodohi, irigasi yang terbengkalai membuat petani merugi, dan sewa tanah yang seenaknya saja membuat Mangkunegaran juga mengalami kerugian.

Residen Surakarta sebelumnya telah menjelaskan bahwa dana cadangan yang ada di dalam kas Praja jumlahnya sangat banyak, bahkan sangat cukup untuk memperbaiki fasilitas umum. Berkali-kali residen mengatakan kepada Mangkunegara VI untuk menggunakan dana cadangan agar rakyatnya sejahtera, namun

<sup>30</sup>Mansfeld, *Op.Cit.*, hlm. 176.

<sup>31</sup>MN. No. 970/15

<sup>32</sup>Mansfeld. *Op.cit.*, hlm. 180.

<sup>33</sup>Bundel D-3 Arsip Reksa Pustaka

<sup>34</sup>Mansfeld. *Op.cit.*, hlm. 179.



Mangkunegara VI membantahnya dengan alasan kas Mangkunegaran tidak cukup untuk memperbaiki seluruh kehidupan rakyat. Alasan Mangkunegara VI di rasa kurang mendukung oleh residen Surakarta, dana cadangan yang besar tersebut akan tetap tersisa meskipun digunakan dalam jumlah yang besar.<sup>35</sup> Semenjak perdebatannya bersama Residen tersebut, Mangkunegara VI pun memulai untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada fasilitas umum dan memperbaiki keamanan pedesaan. Pada tahun 1912, anggaran pendidikan dinaikkan dari f 53,- menjadi f 6.036,-, tahun 1913, kesehatan mulai diperhatikan, sehingga dikeluarkan biaya sebesar f 20.102,- untuk mengatasi masalah kesehatan dan sanitasi di lingkungan Mangkunegaran.<sup>36</sup>

Akibat dari penghematan yang keterlaluhan oleh Mangkunegara VI, rakyat Mangkunegaran harus merasakan hidup jauh dari kesejahteraan karena pemimpin mereka sama sekali tidak memperhatikan nasib rakyatnya. Para petani dan buruh pabrik yang sebagian besar merupakan mayoritas pekerjaan rakyat harus menanggung rugi di saat kas Praja semakin gemuk. Untunglah residen Surakarta peduli dengan nasib rakyat, dan mengajak Mangkunegara VI melihat kenyataan akan rakyatnya. Janji Mangkunegara untuk mensejahterakan rakyat baru dapat dipenuhi ketika menyaksikan sendiri bagaimana rakyatnya hidup. Optimalisasi atau dengan kata lain efisiensi dapat dikatakan berhasil untuk Mangkunegaran, namun gagal untuk mensejahterakan rakyat.

#### D. Akhir Pemerintahan Mangkunegara VI

Selama hampir Sembilan belas tahun R. M. Sujitno menjabat sebagai Mangkunegara VI. Jasanya yang besar terhadap pulihnya kondisi keuangan Praja dan perusahaan tidak dapat diragukan. Pada tahun 1915, Mangkunegara VI telah menghasilkan dana cadangan mencapai tujuh juta golden lebih. Usaha efisiensi dan penghematan yang ia lakukan memperoleh hasil yang manis untuk kondisi keuangan Praja. Kebijakan yang dilakukan Sujitno merupakan sesuatu yang baru di dunia kebangsawanan Jawa, sebab baru masanya menjabat ada seorang raja (pemimpin) yang dengan senang

hati memotong tunjangannya sendiri dan hidup hemat serta sederhana.

Politik efisiensi yang dijalankan Mangkunegara VI tersebut sayangnya tidak mendapatkan simpati dari kerabatnya. Mereka merasa hidup mereka menjadi susah karena adanya penghematan. Keberhasilan yang selama ini dicapai Mangkunegara VI menyebabkan kerabat dan orang-orang yang dulunya telah menentang kepemimpinannya menjadi sangat dengki. Mangkunegara VI pun sadar, di dalam istana pasti ada orang yang tidak suka dengannya, untuk itu ia ingin mengundurkan diri dan menjadikan putranya, R. M. Suyono, sebagai penggantinya. Permintaan tersebut ditolak oleh Residen karena termakan hasutan dari para kerabat dan pihak kolonial yang tidak suka dengan kondisi pemerintahan Mangkunegara VI.

Selama pemerintahan Mangkunegara VI, kerabat raja dihimbau untuk membetasi keinginan-keinginan yang masuk di dalam pengeluaran Mangkunegaran. Mangkunegara VI berpikir bahwa keinginan kerabat dapat menjadi sebuah bencana untuk keseimbangan neraca anggaran Mangkunegaran.<sup>37</sup> Hal tersebut sangat mengganggu kebiasaan bahkan bertolak belakang dengan kehidupan kerabat yang sudah sedari dulu selalu dimanjakan dengan kemewahan. Pada pemerintahan Mangkunegara VI para kerabat merasa hidup mereka disamakan dengan rakyat biasa, hidup sederhana dan seadanya, membuat kerabat menjadi tidak suka dengan gaya hidup keluarga Mangkunegara VI, sehingga bagaimana pun caranya mereka harus membuat Mangkunegara VI turun tahta.

Mendengar bahwa Mangkunegara VI mencalonkan putranya, R. M. Suyono, kerabat beserta pihak kolonial yang tidak menyukai Mangkunegara VI menghasut berbagai pihak dengan menyebarkan isu bahwa R. M. Suyono bukan putra sah Mangkunegara VI, istri Mangkunegara VI mengandung R. M. Suyono sejak sebelum menikah, sehingga tidak dapat meneruskan kekuasaan ayahnya.<sup>38</sup> Kabar burung yang telah tersebar tersebut membuat Residen Surakarta menolak permintaan Mangkunegara VI untuk menjadikan anaknya sebagai penerusnya. Meskipun kabar tersebut kebenarannya masih dipertanyakan, dengan terhormat Mangkunegara VI atau R. M. Sujitno secara besar hati mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan bahwa Mangkunegara VI merasa

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

<sup>36</sup> Laporan keuangan Praja Mangkunegaran Tahun 1911 – 1915, arsip Reksa Pustaka MN. No. 454

<sup>37</sup> Wasino.2014. *Op.Cit.*, hlm. 127.

<sup>38</sup> Sidokmuti. (tanpa tahun). *Sang Satri Pinandhita, Memperingati 40 Tahun Sri Paduka Maangkunegara VI.* (naskah). Arsip Reksa Pustaka

sudah lelah dengan jabatannya sebagai pemimpin Mangkunegaran.<sup>39</sup>

Pada akhir pemerintahannya, Desember 1915, Mangkunegara VI masih sempat memberikan instruksi. Instruksi tersebut tertuang di dalam pranatan 15 Desember 1915, yang intinya menyebutkan bahwa untuk ke depannya, semua penghasilan dan keuntungan Praja harus dimasukkan ke dalam kas Praja, kemudian perusahaan-perusahaan harus membayar kas Praja sesuai dengan ketentuan baru yang akan dikeluarkan pada tahun 1916.<sup>40</sup> Sayangnya, belum sampai menjalankan kebijakan baru, Mangkunegara VI memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 11 Januari 1916, Residen Surakarta mengabulkan permintaan yang telah lama diinginkannya, Mangkunegara VI pun dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Mangkunegara.

Sebagai peringatan perjuangan Mangkunegara VI pada saat memimpin Praja, pihak Praja memberikan kenangan-kenangan berupa cincin emas dengan hiasan berlian diselingi mutiara kepada keluarganya.<sup>41</sup> Merasa sudah tidak dibutuhkan lagi di Mangkunegaran, Mangkunegara VI beserta keluarga pindah ke Surabaya untuk mengasingkan diri dan menghabiskan waktu tuanya bersama anak dan cucu-cucunya. Raden Mas Sujitno sebagai Mangkunegara VI tutup usia pada 24 Juni 1928 dalam usia 71 tahun.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Mangkunegara VI melaksanakan politik efisiensi anggaran dikarenakan Mangkunegaran pernah menjadi sebuah kekuasaan yang sangat cemerlang pada masa Mangkunegara IV. Banyaknya usaha yang telah didirikan oleh ayahnya tersebut membuatnya termotivasi untuk mengembalikan kejayaan Mangkunegaran tersebut. Terjadinya krisis global berdampak pada kondisi keuangan Praja yang mengakibatkan Mangkunegaran di ambang kehancuran, dan membuat Belanda mencampuri masalah keuangan Praja. Selain untuk mengembalikan kejayaan Mangkunegaran, Mangkunegara VI juga memiliki tanggung jawab

untuk memperbaiki keuangan Praja yang berada diambang kehancuran.

Pemangkasan pengeluaran telah direncanakan sejak lama oleh Mangkunegara VI, dan diawali oleh dirinya sendiri dengan memotong tunjangannya. Pada tahun 1911 dikeluarkan peraturan untuk memisah keuangan pribadi Praja dan perusahaan yang mulai dilaksanakan pada tahun 1912. Setelah memisah keuangan, Mangkunegara VI mulai memangkas segala kegiatan yang menyebabkan pengeluaran Praja membengkak. Pegawai-pegawai yang kurang cakap diganti dengan pegawai yang lebih cakap. Penghematan tersebut membuat dana cadangan kas Praja hingga akhir 1915 mencapai tujuh juta gulden lebih. Penghematan tersebut menyelamatkan keuangan Praja.

Dampak yang baik di keuangan tak sejalan dengan dampaknya di kerabat dan narapraja. Akibat penghematan yang berlebih, kerabat dan narapraja tidak suka dengan kondisi pemerintahannya, dan menuntut Mangkunegara VI menghentikannya. Meskipun kondisi perekonomian kerabat dan narapraja dalam keadaan baik, mereka tetap ingin menghentikannya karena juga berdampak kurang baik pada rakyat. Suksesnya mengisi kembali dana cadangan, Mangkunegara VI menjadi gelap mata dan melupakan kepentingan umum rakyatnya, sehingga kehidupan sosial dan ekonominya masih saja buruk.

Efisiensi yang dilakukan oleh Mangkunegara VI bila dilihat dari keseluruhan penulisan hanya bertujuan untuk menggemukkan kas Mangkunegaran. Dengan kata lain politik efisiensi dapat disebut juga dengan politik optimalisasi keuangan yang berdampak pada kondisi keuangan Mangkunegaran yang surplus. Politik efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Mangkunegara VI dapat dikatakan gagal, sebab Mangkunegara VI hanya menimbun kekayaan Mangkunegaran tanpa memanfaatkannya untuk keperluan yang lebih baik. Buktinya, Mangkunegaran menjadi semakin kaya, dan rakyatnya menjadi semakin miskin, jauh dari kesejahteraan karena Mangkunegara VI lebih mementingkan kekayaan Mangkunegaran dibanding memperbaiki kesejahteraan rakyatnya.

### B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh penulis menyangkut penelitian mengenai pelaksanaan politik efisiensi anggaran di Mangkunegaran;

<sup>39</sup>Wawancara M. Ng. Supriyanto Waluyo, SE. Pengageng Kabupaten Mondropuro Mangkunegaran, 10 Mei 2016.

<sup>40</sup>Pranatan Tanggal 16 Desember 1915 No. 12/Q. Arsip Reksa Pustaka MN. No. 454/18.

<sup>41</sup>Naskah Serat Pangetan Kawontenan Tuwin Urutipun Lelampahan Dalem K.G.P.A.A. Mangkunagoro VI Wiwit Miyos Dumugi Sedo. Arsip Reksa Pustaka MN. No. 186, hlm. 5

## 1. Bagi Peneliti Lanjutan

Bagi peneliti lanjutan, perlu dikaji lagi dampak-dampak efisiensi terhadap kehidupan kerabat dan narapraja. Perhitungan keuangan perlu dilakukan seintensif dan seteliti mungkin sebab dalam laporan keuangan hanya dicantumkan rincian pemasukan dan pengeluaran. Penelitian perlu dilakukan sedini mungkin agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

## 2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, perlu memahami tiap kata dan kalimat yang ada dalam hasil penelitian ini. Arsip-arsip serta buku-buku yang berbahasa Belanda perlu diterjemahkan, sehingga mungkin terdapat kalimat dan kata yang kurang pas.

## 3. Bagi Pendidikan

Perlu diadakan efektifitas dalam mengambil contoh mengenai sejarah local. Maksudnya, pendidik perlu untuk mengambil poin-poin penting dari masalah yang dibahas sebagai contoh sejarah politik lokal yang ada di daerah-daerah tertentu, sehingga peserta didik mampu memahami dan bangga terhadap daerahnya.

Surat kepada Gubernur Jenderal tertanggal 12 September 1881 (Salinan) Arsip Reksa Pustaka. Arsip asli berada di Badan Arsip kota Semarang

Keputusan Pemerintah (Rahasia) Tanggal 15 April 1899, terdapat di dalam Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN No. 870.

Suhatmoko. Tanpa Tahun. *Serat Babad Ringkesan Ingkang Sami Jumeneng Ing Praja Mangkunagaran*. (Naskah). Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran No. 1940. Hal. 109.

Surat Pemerintah Hindia Belanda tanggal 2 Juni 1911 kepada Mangkunegara VI. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN.No. 545.

R. M. S. Hadi Soebroto. Tanpa Tahun. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunagoro VI. Naskah Arsip Reksa Pustaka

Naskah Serat Pangetan Kawontenan Tuwin Urutipun Lelampahan Dalem K.G.P.A.A. Mangkunagoro VI Wiwit Miyos Dumugi Sedo. Arsip Reksa Pustaka MN. No. 186. Hal,7.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Arsip dan Sumber Sezaman**

Staatsblad 1857 No. 116

Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN. No. 970/4

Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN. No. 64

Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN. No. 62.

Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN. 970

Laporan Keuangan Praja Mangkunegaran Tahun 1911 - 1915. Arsip Reksa Pustaka MN 454

Pranatan tanggal 4 Maret 1911 No.I/Q. Arsip Reksa Pustaka Mangkunegaran MN.No. 454.

Pranatan tanggal 5 November 1912 No.II/Q. Arsip Reksapustaka MN. No. 454

Pranatan Tanggal 16 Desember 1915 No. 12/Q. Arsip Reksa Pustaka MN. No. 454

Surat Rahasia dari Residen Surakarta kepada Pemerintah Hindia Belanda tanggal 12 April 1879. Arsip Reksa Pustaka

**B. Buku**

A. K. Pringgogidgo. 1950. *Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenagorosche Rijk*. Surakarta: Reksa Pustaka

Booth, Anne. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta : LP3ES IKAPI

Burger D.H. 1983. *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Bhratara.

Haaq, Muhammad Zairul. 2012. *Mangkunegara I: Kisah Kepahlawanan Dan Filosofi Perjuangan Pangeran Samber Nyawa*. Bantul: Kreasi Warna

Mansfeld, W.F. TT. 1986. *Geschiedenis der Eigendommen van het Mangkoenagorosche Rijk*. Surakarta: Reksa Pustaka.

Pringgokusumo, Muhammad Husodo. 1983. *Swapraja*. Surakarta: Reksa Pustaka

Ricklefs, MC. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.



- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Singgih, Pamoentjak dan Roswitha Partini. 1986. *Tulisan Kehidupan Seorang Putri Mangkunegaran*. Jakarta: Djambatan
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1880 – 1920*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- Suhamatmoko.tanpa tahun. *Babad Ringkasan Padatan Kanjeng Gusti Adipati Aria Mangkunegara I - VI*. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Edisi Pemutakhiran Kemunculan Penjajahan di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka
- Wasino. 2008. *Kapitalisme Bumi Putra : Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKiS
- Wasino. 2014. *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa : Mangkunegaran 1896 - 1944*. Jakarta: Penerbit Kompas

#### C. Tesis, Skripsi dan Penelitian Lain

- Aminudin Aris S. 2012. “*Krisis Ekonomi pada Masa Mangkunegara V (1881 - 1896)*”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Mawardi dan Yuliani Sri Widaningsih. 1993. “Perkebunan Tebu dan Petani di Mangkunegaran pada Masa Belanda”. *Laporan Penelitian*. IKIP Veteran Sukoharjo.
- R.M. Iwan Krishna Wardana. 2012. “*Perusahaan Gula Praja Mangkunegaran Masa Mangkunegara VI (1896 - 1916)*”. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Wasino. 1994. “Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran”. *Tesis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

#### D. Wawancara

- M. Ng. Supriyanto Waluyo, SE. Selaku Pengageng Kabupaten Mondropuro Mangkunegaran.